



**PUTUSAN**

Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manado, 03 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MANADO, KELURAHAN / DESA KETANG BARU, SINGKIL, , selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Firmansyah Mopangga bin Ismet Mopangga**, tempat dan tanggal lahir Manado, 03 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman diLingkungan VI Kelurahan Wawonasa (dirumah Ibu. Hartati Harun) Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kelurahan / Desa Wawonasa, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2020/PA.Mdo



1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagaimana termuat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : 177/23/VI/2007 tertanggal 18 Oktober 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai Jejaka Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Ketang Baru sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 Ahmad Shakil Mopengga (laki-laki) berumur 6 tahun;**
  - 3.2 Ahmad Azzam Mopengga (laki-laki) berumur 4 tahun;**
  - 3.3 Ahmad Afif Mopengga (laki-laki) berumur 1 tahun;**Anak pertama, kedua dan ketiga saat ini kesemuanya diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun pada sekitaran awal bulan Mei 2012 rumah tangga antara Penggugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga membuat Penggugat dan anak-anak diterlantarkan oleh Tergugat bahkan Tergugat pergi tanpa ada alasan yang jelas dari Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering kali mengambil hasil pendapatan Penggugat bahkan berupa uang dan perhiasan untuk di gadaikan tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan uang dari hasil barang yang digaikan tersebut hanya di pakai Tergugat untuk berfoya-foya bersama teman-

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2020/PA.Mdo



teman Tergugat sehingga barang yang digadaikan tersebut saat ini telah di lelang oleh salah satu perusahaan milik negara;

- c. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang kerap membentak sampai mengeluarkan suara keras terhadap diri Penggugat bahkan didepan Orang Tua Penggugat sehingga beberapa hari terakhir Tergugat melakukan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
  - d. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 November 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri dan telah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
  6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
  7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

*Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. Satrio A. M. Karim sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 509/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal Senin.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 14 Desember 2020, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 509/Pdt.G/2020/PA Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000.- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2020/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H. dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HUMAIRAH ALWY ASSAGAF, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

**Drs. H. Muhtar Tayib**

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**HUMAIRAH ALWY ASSAGAF, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2020/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 276.000,00  
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2020/PA.Mdo